

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari keseluruhan uraian pada bab – bab di muka, penulis menyimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Faktor – faktor yang terjadi penolakan dalam pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Utara adalah karena perbedaan pendapat antara masing – masing calon pendukung, mereka masing – masing merasa benar dan menyalahkan kelompok pendukung lainnya. Hal ini di tambah dengan perbedaan nilai yang di anut menimbulkan konflik.
2. Usaha mencegah sentimen kedaerahan antara penduduk pribumi dengan penduduk pendatang pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2015, hendaknya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara bersama KPU serta para Tokoh masyarakat secara terus menerus dan intensif memberikan penyadaran dan pencerahan bahwa pribumi maupun pendatang adalah satu kesatuan senasib sepenanggungan, dan sebangsa setanah air. Para tokoh masyarakat di daerah dengan dukungan yang besar bisa menjadi saluran pendidikan toleransi dan kebhinekaan dalam pluralisme. Jika para tokoh masyarakat yang dicintai rakyatnya, menjadi teladan dan mendorong rakyatnya untuk meninggalkan sentimen primordial,

ada kemungkinan sentimen primordial bisa diminimalisir di negeri ini. Selanjutnya provokator harus di cegah secara dini.

Cara lain yang bisa dikerjakan adalah lewat pendidikan formal. Sejak dini, di sekolah - sekolah perlu ditanamkan nilai-nilai pluralisme dan kebhinekaan. Mungkin cara ini bisa sedikit membantu membentuk pemikiran yang benar dalam diri anak. Sehingga sampai dewasa, ia bisa memegang teguh nilai-nilai tersebut dan tidak mabuk dengan fanatisme primordial. Meski pada kenyataannya, saingannya cukup berat. Nilai - nilai kebhinekaan harus bersaing dengan pendidikan yang diterima anak di rumah. Sebab, umumnya fanatisme primordial lahir dan ditanamkan di dalam keluarga, yang celakanya sebagai pendidik perdana dalam perkembangan diri seorang anak.

## **B. Saran**

Sebagai penutup penulis menyampaikan saran tindak sebagai berikut:

1. Pada pemilu – pemilu mendatang baik legislatif maupun pemilihan Kepala Daerah hendaknya konflik tahun 2015 ini tidak terjadi lagi, dan kejadian yang sudah lalu tersebut dapat di jadikan pelajaran untuk mengantisipasi di masa mendatang.
2. Kita semua berharap agar Provinsi Kalimantan Utara yang berusia muda dan bersebelahan dengan Negara lain dapat menjadi ujung tonggak demokrasi, karena sesungguhnya konflik adalah ciri – ciri Demokrasi. Provinsi Kalimantan Utara sebagai bagian Republik

Indonesia menjadikan bahwa “Penolakan” adalah menyampaikan “Kebenaran” demi tujuan Bangsa dan Negara. Indonesia adalah Nusantara, kekayaan kultural dari beragam daerah yang terpendar diberbagai wilayah Indonesia adalah fakta, warisan sejarah, dan realitas.